

PENULISAN SKRIPSI

**KONSEKUENSI YURIDIS DIHAPUSKANNYA PASAL 20 AYAT
2 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG
PATEN TERHADAP KEWAJIBAN PEMEGANG PATEN DI
INDONESIA**



Diajukan oleh :

Sartika Filistea Albraidh Sitorus

NPM : 160512501
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2023

PENULISAN SKRIPSI

**KONSEKUENSI YURIDIS DIHAPUSKANNYA PASAL 20 AYAT
2 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG
PATEN TERHADAP KEWAJIBAN PEMEGANG PATEN DI
INDONESIA**



Diajukan oleh :

Sartika Filistea Albraidh Sitorus

NPM : 160512501
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN SKRIPSI

**KONSEKUENSI YURIDIS DIHAPUSKANNYA PASAL 20 AYAT
2 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG
PATEN TERHADAP KEWAJIBAN PEMEGANG PATEN DI
INDONESIA**



Diajukan oleh :

Sartika Filistea Albraidh Sitorus

NPM : 160512501
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran

Dosen Pembimbing

Tanggal : 28 April 2023

Dr. C. Kastowo, S.H., M.H.

Tanda tangan:

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

KONSEKUENSI YURIDIS DIHAPUSKANNYA PASAL 20 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN TERHADAP KEWAJIBAN PEMEGANG PATEN DI INDONESIA



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 9 Mei 2023
Tempat : Ruang SAF Lt. II

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum
Sekretaris : Dr. C. Kasfowo, S.H., M.H.
Anggota : Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, S.H., M.Hum

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Yudi Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/ skripsi dengan judul KONSEKUENSI YURIDIS DIHAPUSKANNYA PASAL 20 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN TERHADAP KEWAJIBAN PEMEGANG PATEN DI INDONESIA. Penulis percaya bahwa semua yang terjadi karena berkat kasih dan kebaikan dari Tuhan Yang Maha Esa, terutama penulis telah diberikan kemampuan dan kekuatan dalam mengerjakan dan menyelesaikan penulisan hukum/ skripsi ini dalam rangka pemenuhan syarat untuk memperoleh gelar Strata-I (S1) Program Studi Hukum, dengan Program Kekhususan Hukum Ekonomi dan Bisnis di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini, masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, oleh karena itu dalam penulisan hukum/ skripsi ini penulis berusaha memberikan yang terbaik dan mengerjakan dan menyelesaikan penulisan hukum/ skripsi ini, yang mana dalam prosesnya banyak pihak yang berpartisipasi, mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum/ skripsi ini. Penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

2. Bapak Dr. C. Kastowo, S.H., M.H. selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang selalu cermat dan sabar dalam membimbing penulis dari awal hingga akhir, serta selalu menyempatkan waktu ditengah-tengah kesibukan beliau untuk membimbing penulis dalam penulisan hukum/skripsi ini.
3. Bapak Dr. Hyronimus Rhiti, SH., LL.M., selaku dosen pembimbing KRS yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis di setiap semester.
4. Orang tua Bapak Ramses Jannus Pargaulan Sitorus dan Ibu Basaria Rajagukguk atas segala kasih dan doa serta dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum/skripsi penulis.
5. Saudara kandung Katherina Yosefin Sitorus, Dian Tri Utami Sitorus dan Johannes Sitorus yang selalu mendukung penulis dalam proses penyelesaian penulisan hukum/skripsi ini.
6. Kakak Sepupu Dameria Theglori Monica Rajagukguk yang selalu mendukung dan memberikan masukan selama penulisan.
7. Sahabat dan sekaligus teman dekat penulis, Selvia Candra, Findiya Adek Nur Aisiyah, I Nyoman Alit Darmawirawan, Dandy Septian Situmeang, Oryza Sativa Koestaman, Seti Winda Ibrahim, Suksmo Dijaya, Kak Bertha, yang telah selalu memberikan masukan, bantuan, dukungan dan semangat kepada penulis.

8. Teman- teman kuliah penulis, Bastianto Kadarma, Apriani Sinta S, Sonba dan teman-teman penulis yang lainnya, yang telah memberikan masukan dan semangat kepada penulis.
9. Terakhir terima kasih kepada diri saya sendiri selaku penulis karena telah berusaha menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini hingga selesai.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih dan maaf kepada pembaca apabila dalam membaca skripsi ini terdapat kekurangan. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri penulis dan juga pembacanya.



Yogyakarta, 28 April 2023

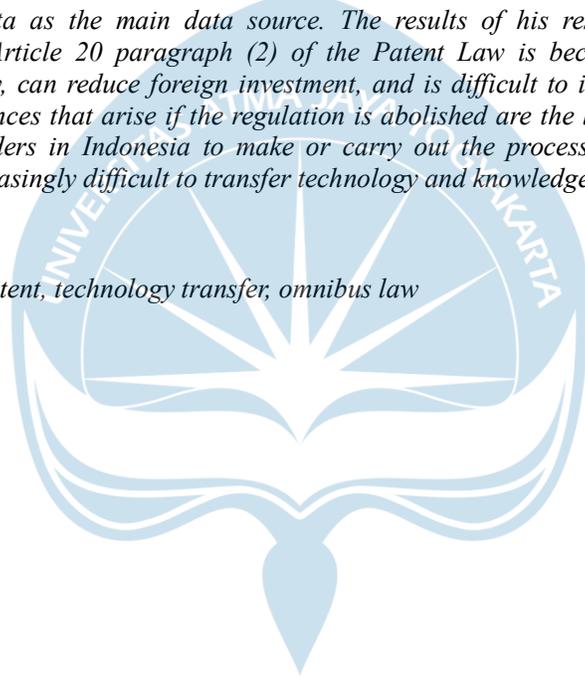
A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sartika Filistea Albraidh Sitorus'. The signature is written in a cursive style with a horizontal line underneath.

Sartika Filistea Albraidh Sitorus

ABSTRACT

Patents are exclusive rights granted by the state to investors for their inventions within a certain period of time, implement the invention themselves or give approval to other parties to implement it. In 2020, the Indonesian government made changes to regulations by issuing the Omnibus Law. The amendment contains the abolition of Article 20 paragraph 2 of the Patent Law, which will have an impact on the loss of obligations of patent holders in Indonesia, especially the obligation to process or use patent processes in Indonesia. This thesis aims to find out the consequences of the abolition of the provisions of Article 20 paragraph (2) of the Patent Law on the obligations of patent holders in Indonesia. The research method used is normative legal research, with secondary data as the main data source. The results of his research show that the abolition of Article 20 paragraph (2) of the Patent Law is because it is considered discriminatory, can reduce foreign investment, and is difficult to implement in practice. The consequences that arise if the regulation is abolished are the loss of the obligations of patent holders in Indonesia to make or carry out the process in Indonesia, and it becomes increasingly difficult to transfer technology and knowledge from inventions.

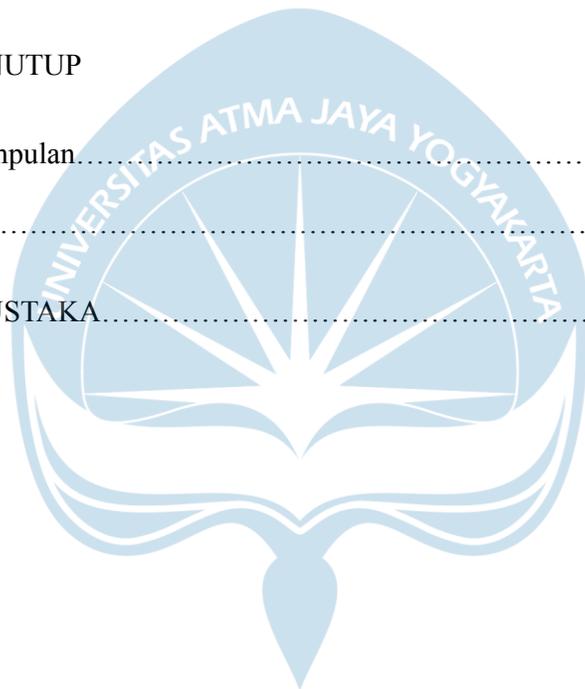
Keywords : patent, technology transfer, omnibus law



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Batasan Konsep.....	10
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Penelitian.....	14
BAB II PEMBAHASAN	
A. Tinjauan Pustaka.....	15
1. Paten.....	15

2. Tinjauan Tentang Alih Teknologi.....	27
B. Perubahan Pasal 20 Ayat (2) Undang-Undang Paten Dalam Undang-Undang Cipta Kerja.....	29
C. Konsekuensi Dihapuskannya Ketentuan Pasal 20 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten Terhadap Kewajiban Pemegang Paten Di Indonesia.....	33
 BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	39
B. Saran.....	40
DAFTAR PUSTAKA.....	41



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.



Yogyakarta, 28 April 2023

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sartika Filistea Albraidh Sitorus". The signature is written in a cursive style with a long horizontal stroke at the end.

Sartika Filistea Albraidh Sitorus